



# PEMAKALAH

Jurnal Penelitian Manajemen Akuntansi Berkala Ilmiah



---

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM MENGUKUR EFISIENSI  
DAN EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN  
BELANJA PADA KANTOR PANGULU NAGORI  
LARAS DUA KECAMATAN SIANTAR  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
PERIODE 2019 – 2022.**

**Alya Hayati<sup>1)</sup>, Liper Siregar<sup>2)</sup>, Hery P Silitonga<sup>3)</sup>**

Program Studi Akuntansi, STIE Sultan Agung, Jalan Surabaya No. 19, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia.

\*E-mail: hayatialya73@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Efisiensi Realisasi Anggaran Dana Desa yang diterapkan di Nagori Laras II Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. 2. Untuk mengetahui Efektivitas Realisasi Anggaran Dana Desa yang diterapkan di Nagori Laras II Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis komparatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran dan pendapatan belanja secara keseluruhan kurang efektif, hal ini dikarenakan anggaran belanja digunakan lebih besar dibandingkan anggaran pendapatannya. Efektivitas anggaran pendapatan dan belanja secara keseluruhan kurang efektif. Hal ini dikarenakan rencana belanja belum terealisasi dan adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksana diakibatkan perencanaan yang kurang matang dan ketidakberhasilan rencana anggaran dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

**Kata kunci: Efisiensi, Efektivitas dan Anggaran Belanja**

***Analysis Of Budget Realization In Measuring The Efficiency And Effectiveness Of Budget Absorption Shop  
At Pangulu Nagori Office Laras Dua, Siantar District Simalungun Regency Period 2019 – 2022***

### **Abstract**

*The objectives of this study are: 1. To determine the Efficiency of Village Fund Budget Realization implemented in Nagori Laras II, Siantar District, Simalungun Regency. 2. To find out the Effectiveness of the Realization of the Village Fund Budget implemented in Nagori Laras II, Siantar District, Simalungun Regency. This research was conducted using qualitative descriptive analysis and comparative analysis. The results of the study can be concluded that the efficiency of the budget and expenditure revenue as a whole are less effective, this is because the expenditure budget is used larger than the revenue budget. The overall effectiveness of the revenue and expenditure budget is less effective. This is because the spending plan has not been realized and there are several developments that have not been carried out due to immature planning and the unsuccess of the budget plan in achieving the set goals..*

**Keywords: efficiency, effectiveness and expenditure budget.**

*Article History: Received:*

*Revised:*

*Accepted:*

---

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa, desa adat, atau sebutan lainnya, merupakan komunitas yang memiliki aturan hukum sendiri dan wilayah tertentu. Mereka berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintah Desa bertanggung jawab menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Salah satu urusan pemerintah desa adalah untuk melayani kepentingan masyarakat di bidang pembangunan fisik dan nonfisik. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah desa membutuhkan dana dari anggaran yang sudah diterima dan melakukan penyerapan anggaran yang di realisasikan untuk pembangunan desa fisik dan non fisik desa itu sendiri.

Pelayanan kepentingan masyarakat desa ditampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dibiayai oleh tiga sumber utama: Pendapatan Asli Desa, yang merupakan pendapatan desa sendiri; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan dana dari pemerintah pusat; dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, yang merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dibagikan ke desa. Pengeluaran APBDes difokuskan pada pembangunan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah desa dan selaras dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat diukur dengan

membandingkan realisasi anggaran pendapatan dengan persentase pencapaian target. Belanja desa merupakan kewajiban yang mengurangi kekayaan bersih pemerintah desa. Setiap tahun, kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui Peraturan Desa. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Kebutuhan pembangunan desa meliputi, namun tidak terbatas pada, kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut bisa dikelompokkan untuk belanja pembangunan fisik meliputi jalan, jembatan, pertanian. Sedangkan embangunan non fisik meliputi pendidikan, kesehatan ekonomi dan lain-lain.

Penelitian analisis realisasi anggaran ini dilaksanakan pada Desa Nagori Laras II Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dorsabarta Silalahi yang menjabat sebagai Pangulu nagori Laras Dua, penulis mendapatkan data sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**

### **Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Tahun 2019-2022**

Tahun	Target APBDes	Realisasi APBDes	Serapan Anggaran %
2019	Rp 757.521.000	Rp 672.396.065	89%
2020	Rp 1.305.981.952	Rp 1.066.391.048	82%
2021	Rp 1.031.753.856	Rp 977.155.575	95%
2022	Rp 1.206.152.974	Rp 1.184.534.560	98%

Sumber: Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja (2019-2022)

Pada tabel 1.1. terlihat pengamatan sementara dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran belanja dari tahun 2019 sampai tahun 2022 lebih rendah dari target anggarannya, yang disebabkan karena adanya program yang belum terlaksana. Pemdes Nagori Laras Dua menetapkan 100% batas ideal.

Menurut hasil penelitian (Sulastri, 2016), menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik, khususnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban masih kurang. Penelitian menunjukkan bahwa ketiga tahap tersebut belum berjalan secara efektif.

## **LANDASAN TEORI**

### **Akuntansi**

Menurut (Sumarsan, 2017), “akuntansi adalah seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Menurut (Anggraini, 2018), “Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan”. Sedangkan menurut (Halim, 2015), “Akuntansi pemerintahan adalah Kegiatan jasa dalam rangka menyediakan

informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”.

### **Anggaran**

Menurut (Nordiawan, 2010), “anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut dan perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut”. Sedangkan menurut (Mulyadi, 2017), “anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun”.

### **Penyerapan Anggaran**

Menurut (Mulyono, 2018), “serapan anggaran adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja”. Kemudian (Bastian, 2015), “menjelaskan bahwa penyerapan anggaran adalah pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata”.

### **Akuntansi Desa**

Menurut (Yuliansyah, 2016), “akuntansi desa berperan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal itu dipertegas dengan adanya keharusan untuk menyusun APBDes yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa”. Menurut (Setyawati and Yoseph, 2019), “akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa,

dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah: masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah, dan pemerintahan pusat”.

### **Laporan Keuangan**

Menurut (Peraturan Pemerintah No. 24, 2015), “Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode”.

### **Efisiensi**

Menurut (Sukmawati, 2014), “Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja organisasi Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan”. Sedangkan menurut (Yohana, 2015), “kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar adalah pengertian lain dari efisiensi kerja. Ini merupakan konsep matematik, atau perhitungan rasio antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*) Seorang yang dapat bekerja secara efisien adalah seseorang yang mendapatkan hasil pekerjaan (*output*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan tersebut (tenaga, bahan, uang, mesin dan waktu) efisiensi kerja menjadi sarana untuk mencapai tujuan organisasi, efisiensi yang tinggi diinginkan oleh manajemen agar organisasi atau perusahaan dapat mencapai efektivitas yang tinggi juga”.

### **Efektivitas**

Menurut (Mauliddin, 2017), efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Menurut (Kadang, Laloma and Tampongangoy, 2021), efektivitas merujuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan atau hasil yang diharapkan.

### **METODE**

Desain penelitian yang digunakan penulisan adalah peneitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis mengumpulkan informasi dan teori dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah dan referensi lainnya, serta mencari informasi melalui media elektronik (*browsing*) dan mempelajari buku-buku karangan ilmiah, catatan dan referensi lainnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Efisiensi pada Nagori Laras Dua**

Untuk mengetahui efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Nagori Laras Dua dengan menggunakan perhitungan yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100$$

Kriteria tingkat efisiensi dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

**Tabel 5.1**

### Kriteria Tingkat Efisiensi

Presentase Pengukuran	Kriteria Efisien
>100%	Tidak Efisien
90 – 100 %	Kurang Efisien
80 – 90 %	Cukup Efisien
60 – 80 %	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Berdasarkan rumus di atas efisiensi pada kantor pangulu Nagori Laras Dua dapat dilihat pada perhitungan berikut :

Untuk tahun 2019, rasio efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa Nagori Laras Dua ditunjukkan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 672.396.065}{\text{Rp } 672.396.065} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 anggaran pendapatan dan belanja dana desa rasionya sebesar 100%, dapat diartikan bahwa rasio ini dikatakan kurang efisien. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran belanja Nagori Laras Dua yang dikeluarkan sama dengan realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

Untuk Tahun 2020, Rasio Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagori Laras Dua ditunjukkan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 1.066.391.048}{\text{Rp } 1.110.504.124} \times 100\% \\ &= 96,03 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 anggaran pendapatan dan belanja dana desa rasionya sebesar 96,03%, dapat diartikan bahwa rasio ini dikatakan kurang efisien. Hal ini dikarenakan Nagori Laras Dua belum berhasil mengelola pengeluarannya dengan lebih efisien.

Untuk tahun 2021, rasio efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa Nagori Laras Dua ditunjukkan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 977.155.575}{\text{Rp } 1.073.346.000} \times 100\% \\ &= 91,04\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2021 anggaran pendapatan dan belanja dana desa rasionya sebesar 91,04%, dapat diartikan bahwa rasio ini dikatakan kurang efisien. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan beberapa rencana pembangunan belum terlaksana seperti yang direncanakan.

Untuk tahun 2022, rasio efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa Nagori Laras Dua ditunjukkan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 1.148.054.775}{\text{Rp } 1.088.054.775} \times 100\% \\ &= 103,82 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2022 anggaran pendapatan dan belanja dana desa rasionya sebesar 103,82%, dapat diartikan bahwa rasio ini dikatakan tidak efisien. Hal ini dikarenakan adanya realisasi anggaran belanja yang berlebih dibandingkan dengan realisasi pendapatannya, maka hasil efisiensi pada Kantor Pangulu Nagori Laras Dua dapat disimpulkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2**  
**Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja pada Kelurahan Nagori Laras**

### Dua Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Serapan Anggaran	Kriteria
2019	Rp 672.396.065	Rp 672.396.065	100%	Kurang Efisien
2020	Rp 1.066.391.048	Rp 1.110.504.124	96,03%	Kurang Efisien
2021	Rp 977.155.575	Rp 1.073.346.000	91,04%	Kurang Efisien
2022	Rp 1.148.054.775	Rp 1.088.054.775	103,82%	Tidak Efisien
Rata-rata	Rp 965.999.365	Rp 1.034.944.698	93,33%	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah (2023)

Terlihat pada tabel 5.2 bahwa tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi sebesar 100% dan dalam kategori kurang efisien, hal ini dikarenakan realisasi belanja sama dengan realisasi pendapatannya yang disebabkan adanya proyek yang tidak berjalan sesuai waktu sahnya. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja adalah sebesar 96,03% mengalami penurunan dan dalam kategori kurang efisien, hal ini dikarenakan realisasi belanja lebih kecil daripada realisasi pendapatan dan pemerintah desa tidak menggunakan SILPA secara bijaksana. Pada tahun 2021 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja mengalami penurunan sebesar 91,04% dan dalam kategori kurang efisien, hal ini dikarenakan realisasi belanja lebih kecil daripada realisasi pendapatan dan dikarenakan adanya kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana. Pada tahun 2022 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja adalah sebesar 103,82% mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan dalam kategori tidak efisien, hal ini dikarenakan realisasi belanja lebih besar daripada realisasi pendapatan.

Dari tabel 5.2 di atas diperoleh nilai rata-rata sebesar 93,33% dan dalam kategori kurang efisien. Dikatakan tidak efisien karena lebih besar realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan realisasi pendapatannya. Hal ini juga dikarenakan adanya SILPA dan perangkat nagori tidak menggunakan SILPA secara bijaksana dan adanya proyek yang pembangunannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya faktor ini berarti Nagori Laras Dua belum menunjukkan kinerja keuangan yang baik pada anggaran belanja dana desa.

### Analisis Efektivitas Pada Nagori Laras Dua

Tingkat efektivitas diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas dapat dilihat pada tabel 5.3 sebagai berikut :

**Tabel 5.3**

#### Kriteria Tingkat Efektivitas

Presentase Pengukuran	Kriteria Efektif
>100%	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90 – 99%	Cukup Efektif
75 – 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Pada tahun 2019 anggaran pendapatan dan belanja dana desa rasionya sebesar 88,76%, dapat diartikan bahwa rasio ini dikatakan kurang efektif karena perangkat nagori belum mampu merealisasikan pendapatannya sesuai yang dianggarkan serta perangkat nagori belum mampu menyesuaikan anggaran yang mana skala prioritas dan yang mana kebutuhan aktualnya.

Untuk tahun 2020 Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagori Laras Dua ditunjukkan dengan perhiungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 1.066.391.048}{\text{Rp } 1.305.981.952} \times 100\% \\ &= 81,65\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 anggaran pendapatan dan belanja dana desa rasionya sebesar 81,65%, dapat diartikan bahwa rasio ini dikatakan kurang efektif karena anggaran yang disusun belum berhasil memenuhi tujuan atau sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Untuk tahun 2021 Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagori Laras Dua ditunjukkan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 977.155.575}{\text{Rp } 1.031.753.856} \times 100\% \\ &= 94,71\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 anggaran pendapatan dan belanja dana desa rasionya sebesar 94,71%, dapat diartikan bahwa rasio ini dikatakan cukup efektif karena pemerintah sudah mampu merealisasikan pendapatannya sesuai yang dianggarkan.

Untuk tahun 2022 Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagori Laras Dua ditunjukkan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 1.184.534.560}{\text{Rp } 1.206.152.974} \times 100\% \\ &= 98,21\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 anggaran pendapatan dan belanja dana desa rasionya sebesar 98,21%, dapat diartikan bahwa rasio ini dikatakan cukup efektif karena pemerintah sudah mampu merealisasikan pendapatannya sesuai yang dianggarkan.

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus diatas, maka dapat disimpullkam hasil perhitungan dan rasio melalui tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4**  
**Tingkat Efektivitas Penyerapan**  
**Anggaran Belanja pada Kelurahan**  
**Nagori Laras Dua Kecamatan Siantar**  
**Kabupaten Simalungun**

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Anggaran Belanja	Serapan Anggaran	Kriteria
2019	Rp 672.396.065	Rp 757.521.000	88,76 %	Kurang Efektif
2020	Rp 1.066.391.048	Rp 1.305.981.952	81,65 %	Kurang Efektif
2021	Rp 977.155.575	Rp 1.031.753.856	94,71 %	Cukup Efektif
2022	Rp 1.184.534.560	Rp 1.206.152.974	98,21 %	Cukup Efektif
Rata-rata	Rp 975.119.312	Rp 1.118.953.415	87,15 %	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan anggaran belanja sebesar 87,15% dikatakan kurang efektif. Pada tahun 2019, tingkat efektivitas pengelolaan anggaran belanja sebesar 88,76%, dapat diartikan bahwa rasio ini dikatakan kurang efektif karena perangkat nagori belum mampu merealisasikan pendapatannya sesuai yang dianggarkan serta perangkat nagori belum mampu menyesuaikan anggaran yang mana skala prioritas dan yang mana kebutuhan aktualnya karena masi ada proyek pembangunan paarit pasangan Huta Sidomulyo yang dianggarkan Rp 344.464.000 tetapi tidak terealisasi, Pembangunan Plat Beton yang dianggarkan Rp 5.098.800 tetapi tidak terealisasi, dan pembangunan parit Huta Lumban Buntu yang dianggarkan sebesar Rp 18.420.178 yang tidak jadi dibangun dan tidak terealisasi. Hal ini menyatakan bahwa pemerintah Nagori Laras Dua tidak mampu merealisasikan anggaran belanja yang ada di nagori itu sendiri.

Pada tahun 2020 tingkat efektivitas pengelolaan anggaran belanja sebesar

81,65% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dapat diartikan bahwa rasio ini dikatakan kurang efektif, karena anggaran yang disusun belum berhasil memenuhi tujuan atau sasaran yang telah direncanakan sebelumnya, seperti adanya pembangunan Cover Drain sebesar Rp 63.911.000 yang tidak terealisasi, dan nada pembangunan parit yang sudah dianggarkan sebesar Rp 145.582.582 yang tidak dibangun dan tidak terealisasi hal ini dikarenakan ketidaktepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang sebenarnya dan pemerintah belum mampu merealisasikan pendapatannya sesuai yang dianggarkan.

Pada tahun 2021, tingkat efektivitas pengelolaan anggaran belanja sebesar 94,71% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan dalam kategori cukup efektif, hal ini dikarenakan realisasi anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran belanja. Pada tahun 2022 tingkat efektivitas pengelolaan anggaran belanja sebesar 98,21% mengalami peningkatan dan dalam kategori cukup efektif, hal ini dikarenakan realisasi anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran belanja.

Dari tabel 5.4 diperoleh nilai rata-rata sebesar 87,15% dan dalam kategori kurang efektif, hal ini dikarenakan pemerintah Nagori Laras Dua belum mampu merealisasikan pendapatannya sesuai yang dianggarkan serta belum mampu untuk membedakan skala prioritas dan yang mana kebutuhan aktualnya.

Realisasi anggaran belanja dana desa yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kemajuan ekonomi di desa dikarenakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di desa diperlukan kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat sekitar, dan dengan adanya anggaran belanja yang diperuntukkan untuk Nagori Laras Dua, anggaran tersebut direalisasikan untuk

berbagai kepentingan nagori, seperti pembangunan. Pembangunan desa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

Pembangunan fisik seperti pembangunan drainase, jembatan, sarana posyandu dan pembangunan balai desa. Sedangkan pembangunan non fisik terdiri dari pelayanan posyandu, pelayanan di bidang kesehatan untuk lansia, dan pelatihan keterampilan kerajinan tangan. Pelaksanaan anggaran tersebut dikerjakan oleh seluruh masyarakat desa Laras Dua. Dari anggaran tersebut warga desa dapat menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membantu menjalankan rencana proyek-proyek yang akan dilaksanakan di desa Laras Dua, dan toko bangunan yang ada di desa dapat menjadi pemasok atau penyedia bebatuan dan alat-alat bangunan kepada proyek tersebut.

Dengan demikian warga akan mendapatkan upah dari pekerjaannya dan mendapatkan keuntungan dari usahanya, dari aktivitas seperti ini yang merupakan *multiplayer* ekonomi yang maksudnya sama-sama diuntungkan dari anggaran yang ada di desa dengan menerapkan prinsip yang efisien dan efektif dapat meningkatkan kemajuan ekonomi di desa.

### **Evaluasi**

Berdasarkan hasil analisis efisiensi anggaran pendapatan dan belanja Nagori Laras Dua, maka penulis dapat menguraikan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dikatakan tidak efisien. Hal ini dikarenakan banyak pembangunan yang melebihi batas waktu sah perencanaannya, hal ini juga dikarenakan adanya SILPA dan perangkat nagori tidak merencanakan dan menggunakan SILPA secara bijaksana, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Sebaiknya pemerintah desa melakukan perencanaan

yang matang dengan menetapkan prioritas anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan nagori dengan melaksanakan rencana yang telah dianggarkan, dan memastikan bahwa semua anggaran dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas anggaran pendapatan dan belanja Nagori Laras Dua, maka penulis dapat menguraikan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kurang efektif. Hal ini dikarenakan rencana belanja belum terealisasi dan adanya kemungkinan beberapa rencana pembangunan belum terlaksana diakibatkan perencanaan yang kurang matang dan ketidakberhasilan rencana anggaran dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Realisasi belanja yang dilakukan pemerintah Nagori Laras Dua lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja. Sebaiknya pemerintah Nagori Laras Dua menyusun anggaran belanja sesuai dengan apa yang dibutuhkan sehingga tingkat efektivitas anggaran pendapatan dan belanja menjadi lebih baik dan penting untuk melibatkan partisipasi dalam proses perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan utama desa, dan memprioritaskan pengeluaran yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis tentang efisiensi anggaran pendapatan dan belanja secara keseluruhan tidak efisien. Nilai terendah pada tahun 2021 sebesar 91,04% dan dalam kategori kurang efisien. Nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar

103,82% dan dalam kategori tidak efisien. Hal ini dikarenakan anggaran belanja yang digunakan lebih besar dibandingkan anggaran pendapatannya. Hal ini juga dikarenakan adanya SILPA dan perangkat nagori belum menggunakan SILPA secara bijaksana. Serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

2. Berdasarkan hasil analisis tentang efektivitas anggaran pendapatan dan belanja secara keseluruhan kurang efektif. Nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 98,21% dan dalam kategori cukup efektif. Nilai terendah pada tahun 2020 sebesar 81,65% dan dalam kategori kurang efektif. Hal ini dikarenakan rencana belanja belum terealisasi dan adanya kemungkinan beberapa rencana pembangunan belum terlaksana seperti yang direncanakan diakibatkan perencanaan yang kurang matang dan ketidakberhasilan rencana anggaran dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Realisasi belanja yang dilakukan pemerintah Nagori Laras Dua lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran untuk Pemerintah Nagori Laras Dua, yaitu :

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Nagori Laras Dua melakukan perencanaan yang matang dengan menetapkan prioritas yang jelas dan membuat rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan nagori.
2. Sebaiknya pemerintah Nagori Laras Dua menyusun anggaran belanja sesuai dengan apa yang dibutuhkan

sehingga tingkat efektivitas anggaran pendapatan dan belanja menjadi lebih baik.

3. Sehubungan dengan keterbatasan penulis, penyajian penelitian ini masih terdapat beberapa kelemahan dan belum dapat mengungkapkan analisis perhitungan rasio efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa secara sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. (2018) 'Peningkatan Pemahaman Guru-Guru SMK Melalui Pelatihan Akuntansi Pemerintahan Guna Menyiapkan SDM Instansi Pemerintah', *Pemberdayaan Masyarakat Madani* [Preprint]. Available at: <http://journalunj.ac.id/unj/index.php/jpm/index>.
- Bastian, I. (2015) *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2015) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kadang, S.B., Laloma, A. and Tampongangoy, D. (2021) 'Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso', *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103), pp. 87–96. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/33606/31801>.
- Mauliddin, A. (2017) 'Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie', pp. 1–74. Available at: <https://onesearch.id/Record/IOS4839.1816/Details>.
- Mulyadi (2017) *Sistem Akuntansi*. IV. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyono (2018) *Berprestasi Melalui JFP*. Yogyakarta: Deepublish publisher.
- Nordiwana, D. (2010) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No. 24 (2015) 'Peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 2015'.
- Setyawati, D. and Yoseph, D. (2019) *Akuntansi dana desa*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Sukmawati (2014) 'Analisis Efisiensi Penggunaan Belanja dan Jumlahh Pegawai Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat.' Available at: <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/107393>.
- Sumarsan, T. (2017) *Akuntansi dasar dan Aplikasi dalam bisnis versi IFRS*. Kedua. Indeks.
- yohana, W. (2015) 'The Effect Of Emloyee Morale And Facilities Toward Employee Efficiency Of Pt Astra International Tbk- Daihatsu Manado', *Emba*, 3, pp. 411–419.
- Yuliansyah, R. (2016) *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.